

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik Suriah yang menjadi kasus perhatian dunia merupakan sebuah konflik yang sangat kompleks, melibatkan berbagai aktor-aktor internasional seperti negara besar dan kelompok-kelompok kepentingan sebagai pendukung pemerintah maupun pemberontak. Untuk itu berbagai analisis serta sudut pandang bermunculan mengenai sebenarnya apa yang sedang terjadi di Suriah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menyajikan berbagai sudut pandang dan berbagai sumber agar diharapkan penelitian ini bersifat objektif.

Fenomena *Arab Spring* yang bermula terjadi di Tunisia pada Desember 2010 bertujuan untuk melakukan protes anti-pemerintah Tunisia yang kemudian menyebar cepat di beberapa negara kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah akibat dari penggunaan sosial media. Gelombang protes pro-demokrasi ini akhirnya dapat menggulingkan pemerintahan Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman (Blakemore, 2019). Akibat keberhasilan gelombang protes yang dapat menggulingkan rezim pemerintah di beberapa negara tersebut, membuat harapan muncul untuk melakukan aksi yang sama oleh aktivis pro-demokrasi Suriah terhadap Presiden Bashar al-Assad yang dianggap mereka otoriter karena rezim Assad telah lama memimpin Suriah sejak tahun 2000 hingga saat ini tahun 2020. Ketidakuasaan dan kemarahan aktivis pro-demokrasi Suriah ternyata sudah terpendam sejak terpilihnya Assad menjadi Presiden Suriah, hal tersebut didasari Assad melanjutkan kepemimpinan ayahnya yang menjabat Presiden Suriah tahun 1971–2000 (Editors, 2019).

Konflik Suriah merupakan sebuah konflik yang terjadi antara pemerintah dan warga sipil terjadi hingga sekarang. Penyebab konflik ini terjadi salah satunya akibat dari fenomena *Arab Spring*, bermula pada Maret 2011 sejumlah 15 anak laki-laki ditahan serta disiksa akibat menulis grafiti mendukung *Arab*

Spring. Salah satu bocah yang ikut terlibat berusia 13 tahun terbunuh setelah disiksa secara brutal (Wulan, 2020). Akibat dari tindakan represif Pemerintah Assad tersebut, terjadi aksi demonstrasi besar-besaran menuntut Presiden Bashar Al-Assad untuk mundur dari jabatannya. Namun, Presiden Bashar Al-Assad menolak tuntutan untuk mundur dari jabatannya. Parahnya aksi demonstrasi tersebut ditanggapi balik oleh rezim Assad dengan tindakan represif berupa tindakan kekerasan seperti tembakan peluru oleh aparat yang menyebabkan kematian dan tindakan memenjarakan secara paksa kepada demonstran.

Faktor lain penyebab Konflik Suriah adalah faktor kesejahteraan sosial, hal ini bisa dilihat dari sebelum *Arab Spring* dimulai banyak orang Suriah mengeluh mengenai tingginya tingkat pengangguran, tingkat korupsi pemerintahan meluas disegala sektor, dan kebebasan berpolitik di bawah kepemimpinan rezim Presiden Bashar al-Assad dibatasi. Bahkan pemanasan global ikut serta memainkan peran pemicu dalam Konflik Suriah, pemanasan global menyebabkan kekeringan di Negeri Suriah dari tahun 2007-2010 menyebabkan sebanyak 1,5 juta orang Warga Suriah melakukan urbanisasi dari pedesaan ke kota untuk mencari kehidupan yang layak, situasi tersebut memperburuk kemiskinan dan kerusuhan sosial (Colin P. Kelley, 2015). Terdapat juga kondisi internal pemerintahan Suriah yang melatar belakangi konflik ini terjadi akibat dari kekuasaan Partai Ba'ath yang telah menguasai di Suriah selama lima dekade. Partai Ba'ath sendiri mendukung Kepemimpinan Assad dengan manuvernya yang semakin menjauh dari dasar konsituen Politik Suriah (Causes and catalysts of the civil war in Syria, 2013).

Setelah mengetahui berbagai faktor serta perspektif penyebab terjadinya Konflik Suriah. Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan perspektif faktor internasional penyebab terjadinya Konflik Suriah, faktor internasional tersebut yaitu terjadinya demonstrasi besar-besaran akibat dari ketidakpuasaan Rakyat Suriah terhadap kepemimpinan Assad

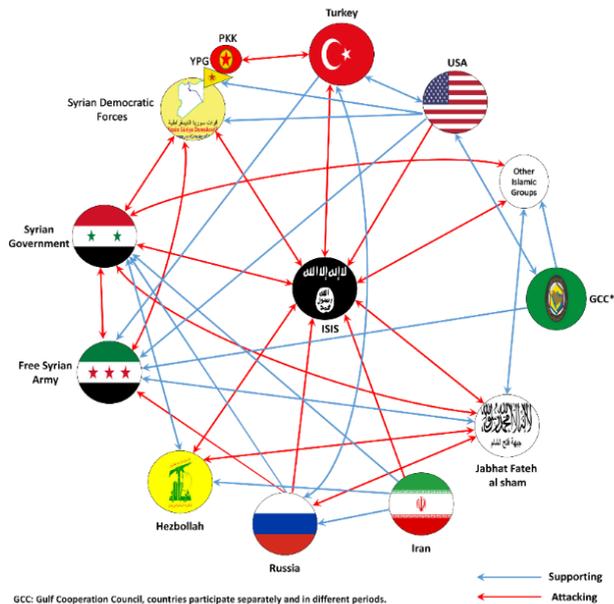
dengan menuntut Assad untuk mundur dari jabatannya dan tindakan represif pemerintah kepada Rakyat Suriah dalam menanggapi fenomena *Arab Spring* yang sedang terjadi pada saat itu.

Akibat dari demonstrasi besar-besaran serta tindakan represif Pemerintah Suriah terhadap rakyatnya, membuat kondisi internal Suriah menjadi kacau. Kondisi tersebut di perparah dengan banyaknya kelompok Islam ekstrimisme dan oposisi yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Assad. Pada Juli 2011, pembelot yang berasal dari militer mengumumkan pembentukan Tentara Pembebasan Suriah/ *Free Syrian Army* (FSA). Awal mula penyebab konflik dimulai ketika kerusuhan menyebar dengan pendukung oposisi mengangkat senjata untuk upaya perlawanan sebagai upaya tindakan membela diri dari pemerintahan yang represif dan kemudian pihak oposisi melakukan pengusiran terhadap pasukan keamanan dari Pemerintah Suriah di daerah mereka (Bakri, 2011). Kelompok radikal Islam ekstrimisme yang terkenal di Suriah yaitu *Islamic State of Iraq and Sham* (ISIS), kehadiran ISIS semakin memperkeruh keadaan internal Suriah setelah banyaknya kelompok oposisi yang ingin menjatuhkan rezim Assad. ISIS sendiri mengatakan dirinya sebagai jihadis melawan Syiah yang dimana merupakan penguasa rezim Suriah yang di pimpin oleh Assad (Gerges, 2016). Tindakan oposisi dan kelompok jihadis tersebut di tanggap dengan pernyataan Assad yang mengatakan pihak yang ingin menjatuhkan rezimnya adalah sebuah gerakan terorisme, Assad berjanji akan menghancurkan tindakan terorisme yang didukung pihak asing serta memulihkan kontrol penuh atas negara. Seketika kekerasan menggunakan senjata meningkat dan membuat Suriah terjerumus ke dalam perang saudara, hal tersebut menjadi awal mula Konflik Suriah.

Perang Saudara Suriah ini menjadi sebuah perhatian dunia, perang saudara ini menyebabkan dampak secara internal dan global. Dampak internal perang menyebabkan korban jiwa berjatuhan hingga tahun 2019 terhitung setengah juta orang telah tewas dan wilayah Suriah menjadi hancur akibat konflik yang sedang berlangsung termasuk banyak orang kehilangan

tempat tinggal, hal tersebut mendorong rakyat Suriah untuk menjadi pengungsi yang ingin keluar dari wilayah Suriah demi mencari keselamatan serta kehidupan yang layak jauh dari konflik. Pengungsi Suriah ini menjadi permasalahan global, mereka memutuskan meninggalkan negaranya dan menyebar di berbagai negara di dunia. Terhitung tahun 2019 lebih dari 5,6 juta pengungsi telah melarikan diri ke Yordania, Lebanon, Irak, Mesir, Eropa dan beberapa negara di Benua Amerika seperti Kanada. Serta sebanyak 6,6 juta orang terlantar di perbatasannya karena tidak di izinkan untuk melintasi perbatasan (Kanso, 2019).

Selain dari banyaknya pihak oposisi yang melawan pemerintah rezim Bashar Al-Assad. Keterlibatan intervensi langsung negara di luar Suriah dalam konflik ini memiliki peran besar dalam jalannya konflik. Secara garis besar adapun pemetaan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam jalannya Konflik Suriah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Participants in Syrian Civil War

Dalam pemetaan tersebut terlihat, bahwa tingkat kompleksitas Konflik Suriah sangatlah tinggi. Dimana pihak satu dengan pihak lainnya memiliki hubungan dan kepentingan didalamnya. Secara singkat berikut penjelasan aktor yang terlibat secara langsung dalam jalannya Konflik Suriah sebagai berikut:

1. Rezim Bashar Al-Assad

Untuk melawan berbagai kelompok pemberontakan di dalam negerinya, Assad juga membangun dukungan dan bantuan dari negara sahabatnya (Suci Sekarwati, 2018). Dua negara yang menjadi pendukung utama dalam menjaga kekuasaan Assad adalah Rusia dan Iran, kedua negara sangatlah membantu Rezim Assad dalam menumpas pemberontakan-pemberontakan yang terjadi.

2. Rusia

Rusia merupakan sekutu lama dari Suriah. Kehadiran Rusia dalam keterlibatan atas perang Suriah memiliki alasan yang kuat dalam memperkuat kembali hubungan dengan Suriah. Kehadiran Rusia dalam Konflik Suriah atas undangan dari Pemerintah Suriah tentunya memiliki kepentingan yang ingin dicapai.

3. Iran

Kehadiran Iran dalam percaturan Konflik Suriah dengan dukungannya kepada rezim Assad tak lain karena memiliki hubungan negeri yang baik. Dimana kedua negara saling mendukung dalam mengecam eksistensi Israel di kawasan Timur Tengah. Sebagai partner dalam mempertahankan kepentingannya membela Palestina atas Israel, Iran adalah negara yang aktif dalam memberi dukungan kepada Hizbullah. Semasa awal konflik berlangsung, Iran merupakan negara yang bersuara besar dalam pembelaannya kepada rezim Assad. Jika Iran tidak mendukung rezim Assad dikhawatirkan Assad akan lengser dan itu membuat Iran akan mendapatkan kesulitan untuk membantu kelompok Hizbullah di Lebanon dalam perlawanannya

kepada Israel. Dukungan Iran kepada Suriah tersebut masih diluar kepentingan strategis dan stabilitas keamanan negeri Iran atas Konflik Suriah (Burdah, 2014).

4. Turki

Turki menjadi salah satu negara yang sangat berusaha untuk menjatuhkan rezim Assad bersama sekutunya. Melalui Erdogan mengklaim bahwa apa yang terjadi di dalam negeri Suriah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Menurutnya konflik tersebut dapat menimbulkan dampak internal terhadap Turki.

5. Kurdi

Etnis Kurdi Suriah adalah etnis yang menempati wilayah Suriah bagian utara. Dalam jalannya Konflik Suriah etnis Kurdi ikut terlibat dalam jalannya konflik demi tercapainya cita-cita mereka untuk menciptakan negara Kurdi.

6. Amerika Serikat dan Sekutu

AS bersama sekutunya adalah kelompok yang memiliki tujuan untuk me-demokratisasi tanah Timur Tengah termasuk dalam Konflik Suriah ini. AS bersama sekutunya menginginkan pergantian pemimpin di Suriah (Harmiyati, 2018).

7. Kelompok Oposisi dan Pemberontak

Perang Suriah merupakan perang yang melibatkan beragam jenis kelompok. Kelompok yang terlibat dalam konflik ini memiliki nama yang berbeda dan memiliki cara pandang yang berbeda juga terhadap jalannya konflik serta memiliki kepentingannya masing-masing. Beberapa kelompok tersebut ada yang berbeda afiliasi namun tujuan kelompok tersebut tetaplah untuk menyerang rezim Bashar Al-Assad. Dari banyaknya kelompok oposisi atau pemberontak, terdapat dua kelompok besar yaitu FSA (*Free Syrian Army*) yang berasal dari pembelot militer dan kelompok jihadis yang paling banyak direpresntasikan oleh ISIS.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas dengan banyaknya aktor mulai dari kelompok kepentingan hingga aktor negara dalam percaturan Konflik Suriah, membuat Konflik Suriah ini tak berkesudahan hingga saat ini. Sesuai judul dalam penelitian ini, penulis selanjutnya akan berfokus kepada keterlibatan dua aktor negara yakni Rusia dan Turki yang akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Rusia yang berada di pihak Assad ikut bergabung dalam konflik Suriah sejak September 2015 setelah mendapatkan permintaan resmi dari Presiden Bashar Al-Assad untuk melakukan operasi militer di wilayahnya. Demi menunjang operasi militer di Suriah, pada tahun 2015 Rusia mengirimkan personil militernya sebanyak 1.700 disertai dengan pengiriman alutsista strategis Rusia seperti Tank, kendaraan lapis baja, sistem artileri, rudal pertahanan udara, pesawat tempur (Su-24, Su-25, Su-30) dan satu lusin helikopter serang darat yang *standby* di bandara kota pelabuhan Latakia (wilayah utara-barat Suriah) (Rodkiewicz, 2015). Selain dukungan militer, Rusia menggunakan hak veto-nya sebagai upaya pembelaan politik internasional untuk Suriah.

Melihat segala dukungan Rusia yang diberikan kepada rezim Assad mendapatkan banyak perhatian dunia, perhatian dunia kepada Rusia berupa kecaman internasional atas tindakannya membela rezim Assad. Dunia internasional kecewa terhadap sikap Rusia atas pembelaannya terhadap rezim Assad karena lebih mengesampingkan kondisi kemanusiaan yang ada di Suriah dengan banyaknya laporan atas kejahatan perang yang diduga dilakukan oleh Rusia. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya laporan internasional atas serangan yang di lancarkan Rusia menargetkan warga sipil, seperti yang dilaporkan oleh *Amnesty International*, pada akhir Februari 2016, kelompok hak asasi manusia telah mendokumentasikan serangan Rusia terhadap sekolah, rumah sakit, dan rumah sipil. Direktur program tanggap krisis *Amnesty International*, Tirana Hassan, mengatakan bahwa setelah membom sasaran sipil, pesawat tempur berputar-putar untuk serangan kedua yang

menargetkan relawan kemanusiaan dan warga sipil yang berusaha membantu mereka yang terluka pada serangan yang pertama (Yeung, 2016). Serta laporan terbaru tahun 2020 oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk pertama kalinya menuduh Rusia terlibat langsung dalam kejahatan perang karena melakukan pengeboman tanpa pandang bulu di wilayah sipil (Borger, 2020).

Kejahatan perang yang diduga dilakukan oleh Rusia sebenarnya mengancam tercapainya kepentingan nasional Rusia di Suriah. Namun, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengatakan ICC tidak dapat menginvestigasi dan menuntut kejahatan perang di Suriah, karena kejahatan tersebut harus dilakukan di wilayah negara anggota. Terdapat pengecualian untuk aturan ini apabila DK PBB memberikan ICC wewenang untuk menyelidiki, maka jaksa penuntut dapat mulai untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Faktanya Suriah tidak termasuk negara yang menjadi anggota ICC dan Rezim Assad membentuk perisai terhadap investigasi kejahatan perang yang dilakukan bersama Rusia yang masih terduga dengan memanfaatkan hak Veto yang dimiliki oleh Rusia. Sebenarnya negara barat sudah membawa kasus kejahatan perang ini ke agenda DK PBB, namun rancangan resolusi tersebut di Veto oleh Rusia dan China. Dari hal tersebut maka kejahatan perang yang diduga dilakukan oleh Rusia tidak akan mengancam kepentingan Rusia di Suriah (Hocaoğlu, 2020).

Sementara Turki sebenarnya terlibat pada Konflik Suriah sejak 2011, keterlibatan Turki dengan mendukung FSA (*Free Syrian Army* / Tentara Pembebasan Suriah) yang melawan Assad. Bentuk keterlibatan Turki melalui organisasi intelijen nasionalnya yaitu MIT (*Millî İstihbarat Teşkilatı*) yang melatih tantara FSA untuk melawan Assad dan ISIS yang pada saat itu menjadi musuh bersama di seluruh dunia.

Intervensi militer langsung Turki pada konflik Suriah dimulai sejak tahun 2016, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan adanya operasi militer yang di beri nama *Operation Euphrates Shield* yang dimulai pada 24

Agustus 2016, berlangsung selama tujuh bulan dan berakhir pada 29 Maret 2017. Operasi militer ini menurut Erdogan untuk memerangi kelompok terror yang berada di Suriah utama target utamanya adalah kelompok Jihadis dan menciptakan zona aman untuk memungkinkan kembalinya para pengungsi Suriah (Reuters Staff, 2018). Dalam operasi militer ini, Turki menggunakan kekuatan militernya sendiri serta memberi bantuan kepada FSA untuk membantunya (Utomo, 2019).

Kritikan dunia terhadap keterlibatan Turki di Suriah adalah kepentingan untuk memerangi Kurdi di Suriah, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengatakan Turki mendukung pihak oposisi (Barbara Plett Usher, 2014). Turki menggunakan kedok keterlibatannya di Suriah untuk memerangi kelompok radikal, namun pada kenyataannya banyak laporan yang menyatakan bahwa Turki tidak memerangi kelompok radikal justru membantu mereka untuk untuk memerangi Kurdi dan menjatuhkan rezim Assad. Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, James R Clapper pada tahun 2015 mengatakan “ Turki tidak akan banyak memerangi radikalisme, justru Turki memiliki prioritas dan kepentingan lain.” Serta James menggaris bawahi tentang jejak pendapat publik di Turki bahwa orang Turki tidak melihat kelompok radikal seperti ISIS sebagai ancaman nasional negara Turki (Tim Arango, 2015).

Kurdi melalui Unit Proteksi Rakyat (YPG) menyatakan Turki berkoalisi serta membantu kelompok radikal terutama ISIS (Zaman, 2014). Tuduhan tersebut terbukti dengan adanya laporan Turki mengizinkan individu dari luar kawasan untuk memasuki wilayah Suriah dengan tujuan untuk bergabung dengan kelompok Jihadis di Suriah, sebuah laporan oleh *Sky News* menunjukkan dokumen paspor Islamis luar Suriah yang ingin bergabung dengan kelompok Jihadis dengan ke Suriah telah di cap oleh Pemerintah Turki (New report further exposes Turkey links to ISIL militants, 2014). Serta sebuah laporan dari David L Phillips dari Institut Hak Asasi Manusia Universitas Columbia mengatakan Turki membantu kelompok radikal

dengan bentuk bantuan senjata, logistik, keuangan, dan layanan medis (Phillips, 2014).

Demi menjaga kepentingan nasionalnya, Turki melalui kementerian luar negerinya menanggapi bahwa tidak ada bukti yang mendukung tuduhan pers dan menegaskan bahwa kelompok Jihadis merupakan ancaman keamanan yang signifikan bagi Turki (Calibrating the Response: Turkey's ISIS Returnees, 2020).

Keterlibatan Rusia dan Turki pada percaturan Konflik Suriah hadir dalam bentuk *hard balancing*, yang dimana kedua negara Rusia dan Turki membela pihak yang berbeda serta memiliki kepentingan yang berbeda, hal tersebut memperlihatkan kedua negara memiliki tujuan atas keterlibatan pada konflik Suriah. Akibat hadirnya kedua negara tersebut membuat terjadinya sebuah persaingan pada konflik Suriah yang semakin berlarut-larut yang tak kunjung usai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas, maka penulis membuat sebuah pertanyaan penelitian, Mengapa Rusia dan Turki terlibat dalam konflik Suriah pada tahun 2015-2020?

C. Kerangka Konseptual

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan adanya kerangka konseptual atau teori untuk mendukung kajian suatu penelitian. Kerangka konseptual sendiri merupakan sebuah bentuk kerangka berpikir yang digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Kerangka konseptual berisi pendekatan ilmiah serta memperlihatkan hubungan antara variabel dalam proses analisisnya (Mas'ood, 1998).

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua konsep. Pertama konsep hegemoni dan kepentingan nasional, dua konsep tersebut menjadi landasan dalam penelitian ini untuk menjelaskan kepentingan Rusia dan Turki pada Konflik Suriah tahun 2015-2020.

1. Konsep Hegemoni

Ditandai dengan banyaknya aktor-aktor negara yang terlibat dalam kasus Konflik Suriah mengindikasikan adanya sebuah perebutan pengaruh atau kekuasaan melalui jalannya Konflik Suriah tersebut. Untuk menjelaskan hal ini, penulis menggunakan konsep hegemoni dari pemikiran Antonio Gramsci yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan agar dapat terjalin abadi dan langgeng dibutuhkan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Adapun syarat yang perlu dilakukan negara menurut Gramsci disebutnya melalui dua buah perangkat kerja. Pertama, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindakan kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain untuk mendapatkan kekuasaan membutuhkan sebuah perangkat kerja *law enforcemant*. Menurut Gramsci perangkat kerja yang pertama ini dilakukan oleh aktor negara melalui lembaga-lembaganya yang memiliki kekuatan memaksa seperti hukum, militer, dan polisi. Perangkat kerja yang pertama ini sangat jelas keberadaannya dalam Konflik Suriah baik secara langsung maupun secara tidak langsung (*proxy war*). Selanjutnya, berdasarkan pemikiran Gramsci untuk perangkat kerja kedua untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dengan menerapkan sebuah perangkat kerja yang mampu untuk membujuk masyarakat untuk taat kepada pranata-pranata (adat, institusi, konvensi, lembaga) negara yang sedang berkuasa. Cara tersebut dilakukan dalam berbagai bidang kenegaraan melalui agama, budaya dan afiliasi politik (Femia, 2011). Dalam penelitian ini, menurut pandangan pemikiran yang berasal dari Gramsci menurut penulis baik negara Rusia maupun Turki saling mengintervensi rakyat Suriah agar mereka memperjuangkan kepentingan negara dipihak pendukung rezim Assad/ Rusia dan pemberontak/ Turki.

Berdasarkan konsep pemikiran pertama yang penulis angkat dalam penulisan ini, bahwasannya Rusia

dalam keterlibatan pada Konflik Suriah memiliki tujuan hegemoni untuk mempertahankan pengaruh hegemoninya di sekutunya yaitu Suriah yang terancam akibat dari intervensi Amerika Serikat dan sekutunya dalam jalannya konflik ini. Sedangkan Turki dalam keterlibatannya pada Konflik Suriah juga memiliki tujuan hegemoni untuk menciptakan hegemoninya di negara-negara yang mengalami gejolak akibat dari Arab Spring terutama Suriah dalam penelitian ini. Turki sendiri selalu memposisikan diri sebagai pendukung rakyat yang melawan rezim pemerintahannya, serta dengan konsisten dan tegas Turki selalu mendukung proses perubahan di dunia Arab untuk membangun hegemoninya di kawasan.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Berbicara tentang konsep kepentingan nasional dalam kajian penelitian ini, bertujuan untuk membaca faktor kepentingan dan tujuan politis aktor negara Rusia dan Turki dalam jalannya Konflik Suriah. Kepentingan nasional sangat erat hubungannya dengan penggunaan *power* yang sifatnya destruktif (penggunaan *hard power*) kepada negara lain seperti yang dilakukan oleh Rusia dan Turki di Suriah.

Berdasarkan pemikiran Jack C Plano dan Roy Olton dalam bukunya *The International Relation Dictionary* mendefinisikan kepentingan nasional sebagai tujuan yang paling pokok serta menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan para pengambil keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara memang berbeda-beda, namun menurut Plano dan Olton terdapat lima kategori umum yaitu : (Jack C. Plano, 1982)

a. *Self Preservation* :

Merupakan hak suatu negara untuk mempertahankan eksistensi diri dari negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu konsep mempertahankan diri ini berkembang tidak

hanya didasarkan pada landasan geografis negara, melainkan juga berkaitan dengan kekuasaan atau hegemoni suatu negara di negara lainnya, sehingga dapat dikatakan negara yang merasa terancam dituntut untuk menggunakan kekuatan dalam negerinya agar hegemoni kekuasaannya dapat dipertahankan.

b. Independence :

Merupakan hak suatu negara untuk memiliki kemandirian untuk mengatur urusan negaranya terkait masalah ekonomi maupun militer tanpa tekanan atau intervensi dari negara lain.

c. Territory Integrity :

Dalam hal ini kepentingan nasional negara untuk mengamankan kedaulatan teritorialnya, termasuk segala sumber daya yang berada didalamnya.

d. Military Security :

Kekuatan militer yang dimiliki suatu negara akan dijadikan nilai untuk menjaga keamanan kedaulatan teritorial dari ancaman militer negara lain maupun kelompok separatis yang mengancam wilayahnya.

e. Economic Well Being :

Memiliki tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi nasional pada kualitas hidup rakyat dalam negeri dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

Hal tersebut juga sesuai dengan konsep pemikiran Hans J. Morgenthau yang mengatakan bahwa perilaku negara dalam hubungan internasional adalah untuk menjaga agar elemen-elemen kekuatan yang dimiliki negara tetap dapat menjamin kedaulatannya di antara negara lain (Burchill, 2005). Oleh karena itu, pada konsep kepentingan nasional pada kajian penelitian ini memiliki sorotan utama untuk menjelaskan bagaimana manuver Rusia dan Turki untuk memperoleh kepentingan nasionalnya dalam perang Suriah.

Dari penjelasan di atas, penulis beranggapan bahwa kepentingan nasional Rusia dan Turki dalam perang Suriah memiliki keterkaitan dengan konsep hegemoni yang penulis kaji sebelumnya. Menurut penulis kepentingan nasional yang dijalankan Rusia dan Turki dalam perang Suriah dijadikan sebagai strategi atau sebuah jalan kedua negara untuk mendapatkan hegemoni dalam perang Suriah dengan catatan ketika kepentingan nasional tersebut dapat tercapai. Sesuai penjelasan dalam konsep hegemoni oleh Gramsci pada perangkat kerja kedua mengatakan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan maka diperlukannya sebuah perangkat kerja yang mampu untuk membujuk masyarakat untuk taat kepada pranata-pranata negara yang ingin berkuasa. Mudah-mudahan berdasarkan asumsi penulis pranata tersebut adalah sebuah kepentingan nasional. Ketika kepentingan nasional tercapai maka secara tidak langsung hegemoni tersebut dapat diraih dengan sendirinya.

Seperti yang sudah penulis bahas sebelumnya, bahwasannya sesuai dengan pemikiran Plano dan Olton menurut penulis dari lima kategori umum terdapat dua unsur yang tepat untuk diaplikasikan dalam pembahasan ini yaitu pertama unsur *self preservation* dimana Rusia memiliki tujuan untuk mempertahankan eksistensi dirinya di Suriah atas kekuatan barat yang berkembang ketika barat ikut dalam intervensi langsung kedalam konflik ini. Sedangkan Turki tidak ingin apa yang terjadi di Suriah saat ini dengan perebutan hegemoni antara Rusia dan Amerika menjadi masalah *self preservation* yang mengancam Turki pada kemudian hari. Unsur yang kedua yang penulis angkat berdasarkan pemikiran kepentingan nasional dari Plano dan Olton adalah *military security* dimana akibat dari meletusnya perang Suriah ini membuat keamanan kedaulatan baik Rusia dan Turki menjadi terancam, akibat dari hal tersebut isu *military security* dari kedua negara menjadi faktor kepentingan nasional yang harus dicapai di Suriah.

D. Hipotesa

Berdasarkan asumsi di atas, penulis membangun hipotesis sebagai berikut:

1. Akibat dari intervensi Amerika Serikat bersama sekutunya kedalam Konflik Suriah dianggap sebuah ancaman bagi hegemoni Rusia atas sekutunya yaitu Suriah. Sebagai upaya untuk mempertahankan hegemoninya, maka Rusia melakukan strategi untuk mempertahankan hegemoninya melalui kepentingan nasional di tanah Suriah.
2. Melihat perubahan kebijakan luar negeri Turki yang terlihat aktif dalam menebar pengaruh di kawasan Timur Tengah, mengindikasikan bahwa Turki ingin menciptakan hegemoni di kawasan. Serta dengan meletusnya perang Suriah yang sangat berdampak langsung pada Turki membuat negaranya memiliki jalan untuk menciptakan hegemoninya melalui kepentingan nasional dalam perang Suriah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan ini, sekaligus membuktikan dugaan dengan fakta dan data yang tersedia. Di mana dalam hal ini untuk mengetahui alasan keterlibatan langsung Rusia dan Turki pada Konflik Suriah Tahun 2015-2020.
2. Untuk mengetahui hubungan bilateral Rusia dan Turki karena mendukung kelompok yang berbeda pada Konflik Suriah (*Proxy War*).
3. Secara akademisi untuk mengimplementasikan ilmu dan teori-teori yang diperoleh selama masa studi Ilmu Hubungan Internasional, terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
4. Sebagai sarana kewajiban akademis sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar

kesarjanaan strata-1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Dapat memberikan pengetahuan terkait dukungan dan peran yang dilakukan Rusia-Turki terhadap pihak yang didukungnya dalam Konflik Suriah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bahan tambahan pemikiran dan pertimbangan pada penelitian selanjutnya dalam studi Ilmu Hubungan Internasional terkait keterlibatan Rusia dan Turki pada jalannya Konflik Suriah tahun 2015-2020.

G. Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam penelitian ini dibutuhkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pada pembahasan penelitian, selain itu juga untuk membantu pembuktian terhadap pokok permasalahan dan hipotesa yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, penulis telah membatasi kajian penelitian pada bidang pencapaian kepentingan nasional untuk upaya hegemoni dengan menunjukkan eksistensi militer dan dukungan pada pihak yang didukung oleh Rusia dan Turki pada Konflik Suriah tahun 2015-2020. Serta tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk mencamtukan sejumlah data lain yang mendukung penulisan penulisan ini meskipun di luar jangka waktu yang telah ditetapkan.

H. Metodologi Penelitian

Terdapat jenis penelitian, jenis data, dan metode penulisan yang dipakai dalam mengkaji penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan objek penelitian secara rinci dan mendalam untuk mengembangkan

pemahaman suatu peristiwa. Dalam pelaksanaan menggunakan metode penelitian kualitatif dilakukan dengan menggali segala informasi yang berkaitan secara terus menerus untuk mendapatkan jawaban mengapa suatu peristiwa dapat terjadi. Serta penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang akan memberikan penjelasan atau gambaran terhadap suatu objek penelitian melalui data yang telah terkumpul dan diakhir dengan memberikan kesimpulan yang bersifat umum (Sugiyono, 2017).

2. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Pencarian data sekunder tersebut dengan pengumpulan melalui studi pustaka (*library research*). Data sekunder menurut Sugiyono merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, skripsi, jurnal, dan sumber referensi ilmiah lainnya di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sumber pustaka lainnya didapat melalui media elektronik internet, yang memiliki kredibilitas terpercaya untuk mendukung isi dari penelitian ini dan membantu penulis mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan alasan Rusia dan Turki yang melakukan hegemoni dalam konflik Suriah.

3. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menganalisis dari kesimpulan secara umum dan kemudian penulis bisa menarik kesimpulan secara khusus (Sukmadinata, 2011). Dalam hal ini, penulis terlebih dahulu menggambarkan secara umum, kemudian penulis menarik kesimpulan secara khusus untuk meneliti mengenai alasan yang mendorong Rusia dan Turki terlibat dalam konflik Suriah periode 2015-2020.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan terdiri dari empat bab. Keempat bab tersebut akan lebih lanjut lagi diuraikan melalui sistematika berikut ini :

BAB I

Pendahuluan

Dalam bab ini memuat kerangka utama dalam penyusunan penelitian berupa latar belakang masalah yang menjadi tema penelitian ini. Selanjutnya peneliti menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesa, metode penelitian dan konsep pemikiran yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian ini.

BAB II

Dinamika Hubungan Bilateral Rusia dan Turki

Dalam bab ini akan menjelaskan hubungan bilateral antara Rusia dengan Turki sebelum Konflik Suriah dan saat era Konflik Suriah, khususnya memperlihatkan hubungan bilateral Rusia dan Turki pada peristiwa Konflik Suriah ketika mereka memiliki kepentingan tersendiri dan dukungan kepada pihak yang berbeda. Kemudian akan ada beberapa contoh kerjasama yang telah dilakukan keduanya pada sebelum konflik dan era konflik.

BAB III

Keterlibatan Rusia dan Turki dalam Dinamika Konflik di Suriah

Dalam bab ini akan dibagi menjadi dua subbab, pertama adalah penjelasan dukungan dan peran yang dilakukan Rusia kepada rezim Assad, kedua penjelasan terkait dukungan dan peran yang dilakukan Turki pada pihak

oposisi. Kedua sub bab itu sangat mempengaruhi dalam jalannya Konflik Suriah.

BAB IV

Analisis Kepentingan Keterlibatan Rusia dan Turki dalam Konflik Suriah

Dalam bab ini akan menjawab pertanyaan penelitian yaitu mengapa Rusia dan Turki terlibat langsung kedalam Konflik Suriah pada tahun 2015-2020. Sesuai dengan kerangka pemikiran kepentingan nasional dan hegemoni yang akan terlihat sejumlah faktor penting yang memicu keterlibatan Rusia dan Turki kedalam jalannya Konflik Suriah.

BAB V

Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan dengan mengkorelasikan bab-bab sebelumnya sehingga terciptanya pandangan penulis atas hasil penelitian pada skripsi ini.